

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA DENPASAR**

**(Studi Kasus : Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja
Sewakadarma)**

Puji Lestari Marpaung¹⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari²⁾, Ni Putu Anik Prabawati³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: pujilestarimrp20@gmail.com¹⁾, putriwirantari@unud.ac.id²⁾, prabawati@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

A regional levy is a regional levy as payment for services or the issuance of specific permits provided or granted by regional governments specifically for personal or business benefit, the items and contributions of which are linked to regional revenue growth. to increase Park fees, one of the unique sources of income from the community, is managed by the Bukti Praja Sewakadharma Regional Authority. The management of parking fees to increase the income of the city of Denpasar itself is included in Denpasar Municipal Ordinance No. 19 of 2011 in retaliation against public street parking services. In order to increase the original local income of Denpasar City, it is necessary to increase the park usage fee income, which will affect the local development. The research method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques used are observations, interviews and documentation. The results of the study show that the management of parking fees on public roads in Denpasar City is not optimized. This is illustrated by the fact that there are still valets who charge parking fees that do not correspond to the accuracy of the rates stated in the regulations, and that many illegal valets are still active. The purpose of this study is to clarify how parking fee management in Denpasar City increases the original area using the management theory of G.R Terry (2018).

Keywords: Management, Local Revenue, Parking Retribution

1. PENDAHULUAN

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang masih terkendala dengan retribusi parkir yang tidak terkelola dengan baik. Selain

menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tol daerah juga menjadi faktor dominan dalam peran dan kontribusinya dalam mendukung pemerintah daerah, termasuk retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari pemerintah kota. Pengelolaannya dilakukan oleh Perusahaan Parkir Kota Denpasar.

Mulai dari awal pandemic Covid-19, di Kota Denpasar mengalami hilangnya lahan parkir. Hilangnya lahan tersebut karena banyak yang ditutup imbas dari mewabahnya Covid-19. kondisi pandemi Covid-19 membuat pendapatan PD Parkir menurun drastis dari target. Penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya tempat perparkiran di Denpasar harus tutup. Otomatis, parkir juga harus terhenti karena tidak ada yang parkir dan semasa pandemi Covid-19 PD Parkir hanya mempertahankan perparkiran yang masih bertahan dan mengandalkan yang masih ada.

Berdasarkan hasil observasi, bahwa masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan retribusi parkir di badan jalan kota denpasar, Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar (Studi kasus Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma). Berdasarkan latarbelakang yang sudah dijabarkan maka peneliti ini mengajukan rumusan masalah berupa : Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar (Studi Kasus Perusahaan Umum

Daerah Bhukti Praja Sewakadarma) dengan tujuan berupa Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu dana pokok bagi pemerintah daerah untuk menerima dana pembangunan dan menutupi pengeluaran daerah. Pendapatan mandiri daerah juga merupakan upaya daerah untuk meminimalkan kehandalan pendanaan dari tingkat atas pemerintahan (Wijaya, 2001:42).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah, sebagai perwujudan desentralisasi, untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perparkiran. Kendaraan yang diparkir adalah kendaraan yang diparkir atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Biaya Parkir (“Biaya”) adalah biaya penggunaan fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Negara Bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi parkir di Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu

retribusi parkir pinggir jalan berdasarkan Perda Provinsi Denpasar No 19 Tahun 2011 dan retribusi parkir khusus berdasarkan Perda Provinsi Denpasar No 20 tahun 2011.

Manajemen

Manajemen berasal dari kata manage dan berarti mengatur. Pengaturan dilakukan melalui suatu proses dan tertata menurut urutan fungsi administrasi. Oleh karena itu, manajemen adalah proses pencapaian tujuan yang dicapai hal tersebut melalui 4 fungsi menurut G.R. Terry (2018) diterjemahkan oleh R. Supomo dan Eti Nurhayati, yaitu:

- a. Perencanaan adalah pemilihan fakta, penggabungan fakta, dan pembuatan serta penggunaan perkiraan atau asumsi tentang masa depan dengan menggambarkan dan merumuskan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Pengorganisasian tidak mungkin dilakukan tanpa hubungan dengan orang lain dan penugasan tugas khusus untuk setiap unit, menempatkan orang-orang (pegawai) dalam kegiatan-kegiatan itu, dan menugaskan faktor-faktor fisik yang sesuai dengan tujuan pekerjaan, guna mencapai suatu tujuan. Ini untuk menyediakan dan menunjuk hubungan yang disetujui. Kinerja kegiatan yang diharapkan.
- c. Aktivasi adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok untuk mau dan berusaha keras

mencapai tujuan dengan tulus dan selaras dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian kepemimpinan.

- d. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses meniru apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaannya, dan bila perlu perbaikan-perbaikan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan penggunaan pendekatan deskriptif pada permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Oleh PD Parkir di Pasar Seni Kumbasari Denpasar.

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh suatu gambaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini yang dipakai penulis yaitu peraturan daerah, buku, jurnal dan bahan-bahan lain yang menunjang penelitian. Dengan pertimbangan hal tersebut penulis akan menentukan lokasi penelitian dan unit analisis dengan sengaja (purposive) yang dilakukan di Badan jalan kota Denpasar. Alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan yang mengawasi dan mengelola di PD Parkir Kota Denpasar serta pelaksanaannya yang dapat dirasakan masyarakat masing-masing tempat parkir di Kota Denpasar.

Penulis memiliki pertimbangan untuk memilih informan yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Informan yang mengetahui dengan jelas tentang Pengelolaan Retribusi Parkir dalam hal ini Kepala PD Parkir Kota Denpasar, Kepala Bidang Prasarana, Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, dan Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana.
2. Informan yang bertugas Koordinator parkir, petugas Parkir di badan jalan kota Denpasar dan Masyarakat yang akan penulis temui secara random yang bersedia dijadikan informan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis menekankan pada wawancara untuk mengamati variable-variabel dalam penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Retribusi Parkir Di Kota Denpasar

Pada pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber retribusi daerah terhadap PAD Kota Denpasar nyatanya dihadapkan dengan persoalan yang mana menghambat manajemen parkir. Dimana dapat dibuktikan dengan beberapa kendala yang didapatkan dilapangan parkir. Berikut ini penyajian data pendapatan retribusi parkir dari tahun 2017 – 2021.

Jumlah Retribusi Parkir Badan Jalan

No	Tahun	Retribusi Parkir Badan Jalan
1	2017	RP. 9.419.759.000
2	2018	RP. 11.020.090.000
3	2019	RP. 11.628.714.000
4	2020	RP. 7.869.664.000
5	2021	RP. 8.228.648.000

(Sumber : Laporan Tahunan Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 yang artinya retribusi parkir sudah sanggup untuk membantu PAD lebih meningkat lagi. Tetapi pada tahun 2020 retribusi menurun karena pandemi covid 19 bisa dibalang retribusi turun menjadi rendah sekali tetapi Perumda parkir masih sanggup untuk membantu PAD. Apalagi jika dilihat pada saat naik turunannya retribusi parkir ini hanya diakibatkan karena covid 19 berarti sebenarnya bahwa Perumda Parkir sanggup untuk memenuhi PAD di Kota Denpasar setiap tahunnya.

Daftar Penerimaan Parkir Badan Jalan Untuk Masing-Masing Wilayah Bulan Januari-Agustus 2022

No	Bulan	Jumlah Retribusi Parkir Harian				Jumlah Ret Keseluruhan
		Wilayah Barat	Wilayah Timur	Wilayah Selatan	Wilayah Utara	
1	Januari	Rp.238.298.000	Rp.233.017.000	Rp.178.603.000	Rp.182.249.000	Rp.832.167.000
2	Februari	Rp.219.919.000	Rp.198.356.000	Rp.151.334.000	Rp.165.727.000	Rp.735.336.000
3	Maret	Rp.237.673.000	Rp.216.112.000	Rp.167.188.000	Rp.176.825.000	Rp.797.798.000
4	April	Rp.243.309.000	Rp.246.839.000	Rp.4.825.000	Rp.167.780.000	Rp.852.753.000
5	Mei	Rp.231.651.000	Rp.248.797.000	Rp.169.801.000	Rp.192.651.000	Rp.842.900.000
6	Juni	Rp.230.360.000	Rp.243.508.000	Rp.174.035.000	Rp.175.153.000	Rp.823.056.000
7	Juli	Rp.259.628.000	Rp.279.192.000	Rp.198.160.000	Rp.195.670.000	Rp.932.650.000
8	Agustus	Rp.290.522.000	Rp.317.681.000	Rp.227.266.000	Rp.227.460.000	Rp.1.062.929.000

(Sumber : Perusahaan Daerah Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 Perumda Parkir Kota Denpasar sudah mampu meningkatkan retribusi badan jalan kota denpasar dari peningkatan setiap bulan penerimaan retribusi parkir tersebut. Ini tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Perumda Parkir Kota

Denpasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar.

Jumlah Pengaduan layanan Parkir Kota Denpasar sudah melaksanakan Tugasnya dengan baik dan terpantau dalam pelaksanaan Pengelolaan Parkir Kota Denpasar sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik seperti apa yang ditargetkan oleh Pd Parkir untuk satu Tahun yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota denpasar. Jumlah yang mengadu dalam pelayanan parkir di balan jalan baik melalui telepon, Website, media sosial dan maupun secara langsung perihal permasalahan dilapangan cukup minim karena Pd Parkir sudah melakukan tugasnya masing-masing secara baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Program yang dilakukan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma adalah Manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan bila ingin mewujudkan tujuan yang ingin diraih. Adapun menurut Nugroho (2003) manajemen merupakan proses mengatur dan menangani suatu hal agar dapat mencapai tujuannya. Maka dari itu diperlukan manajemen agar tujuan dapat tercapai, selain itu manajemen yang dilakukan pun tidak boleh asal jalan saja, manajemen harus dilakukan secara baik dan matang agar tujuandapat dicapai secara maksimal tanpa hambatan. Melihat hal ini Perumda Parkir Kota Denpasar berusaha untuk melaksanakan manajemen yang baik dengan membuat beberapa program manajemen agar kegiatannya tertata sehingga dalam pelaksanaannya bisa fokus menjalankan

program secara baik. Adapun program kegiatan yang dilakukan oleh Perumda Parkir Kota Denpasar antara lain:

1. Kegiatan pembinaan bagi juru parkir Sebelum menjadi juru parkir resmi, maka calon juru parkir diharuskan untuk melakukan pendaftaran diri terlebih dahulu ke Perumda Parkir Kota Denpasar. Saat mendaftarkan diri itulah dilakukan pembinaan awal kepada para calon juru parkir selain mengisi persyaratan untuk menjadi petugas juru parkir resmi. Tidak berhenti sampai disana pembinaan lainnya juga sering dilakukan oleh Perumda Parkir Kota Denpasar saat turun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengawasan dan tak jarang diadakan pelatihan yang mengundang beberapa juru parkir beserta narasumber yang memang ahli di topik pembinaan kala itu.
2. Kegiatan intensifikasi retribusi parkir. Proses pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir dibagi menjadi 3 tahapan. Adapun tiga tahapan intensifikasi retribusi yaitu sebagai berikut :
 - a. Prosedur menjadi juru parkir resmi, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu melengkapi dan mengumpulkan surat permohonan, fotocopyan identitas diri seperti KK, 2 lembar Pas foto 3 x 4, surat kesanggupan setor, surat

- pernyataan bersedia menaati kewajibannya sebagai juru parkir.
- b. Penetapan titik lokasi parkir diputuskan dengan melihat dan mempertimbangkan rencana umum tata ruang kota, kenyamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, kelestarian lingkungan dan kemudahan untuk pihak yang menggunakan jasa parkir.
 - c. Tata cara pemungutan hingga dengan disetorkan kepada Koordinator Juru Parkir. Adapun pemungutan yang dihasilkan dengan cara setoran langsung ke Korjur. Penyetoran juga dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan sistem setoran harian, mingguan maupun bulanan.
3. Kegiatan pemberian atribut resmi kepada juru parkir Memberikan atribut resmi lainnya yang dibutuhkan oleh para juru parkir sebagai upaya untuk melindungi, mengawasi, mengenali serta membedakan juru parkir resmi atau tidak. Atribut resmi yang diberikan yakni rompi dan kartu tanda anggota (KTA) yang digunakan untuk membedakan dan identitas resmi juru parkir yang di bina oleh Perumda Parkir Kota Denpasar.
 4. Kegiatan Pengawasan Parkir Kota Denpasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap area parkir dan petugas parkir yang berada dibawah

tanggung jawabnya. Pengawasan dilakukan dengan cara mengecek langsung ke lokasi parkir yang ada. Apabila ditemukan pelanggaran maka Perumda Parkir akan memberikan sanksi. Dimana paling ringan yaitu peringatan dan paling berat yaitu pencabutan surat izin.

Hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap retribusi parkir yang dikelola di Denpasar dapat dilihat di bawah:

1. Perencanaan

Perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan suatu proses penentuan tujuan atau target yang akan dicapai serta memutuskan cara yang akan ditempuh dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan hal tersebut pihak Perumda Parkir Kota Denpasar selaku penanggung jawab harus menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan hal ini dibuktikan dengan perencanaan pertama yang dilakukan pihak Perumda Parkir Kota Denpasar yaitu menentukan target-target yang harus dicapai.

Perumda Parkir Kota Denpasar dalam menentukan target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara mengumpulkan informasi yang nantinya dapat dijadikan perkiraan untuk lahan parkir di kota denpasar.

Dengan mengupayakan bagaimana potensi yang bisa diolah secara efektif untuk dijadikan lahan parkir. Dalam hal perencanaan Perumda Parkir Kota Denpasar memiliki program untuk memperluas lahan titik parkir di Kota Denpasar. Program ini yang akan dijalankan selama 1 tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Programnya memperbanyak luasan titik parkir yang menggunakan non tunai, selain itu juga dibuktikan dengan pengawasan langsung untuk mencari target titik parkir yang dilakukan yang sudah menjadi lahan parkir di Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam melaksanakan manajemen parkir guna peningkatan PAD pihak Perumda Parkir Kota Denpasar selaku penanggung jawab telah menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaannya ternyata belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan perencanaan yang dilakukan pihak Perumda Parkir Kota Denpasar yaitu menentukan target-target yang harus dicapai. Perencanaan yang dilakukan oleh Perumda Parkir dalam satu tahun penuh yaitu ingin melaksanakan E-Parkir di Kota Denpasar namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dikarenakan Keuangan yang dimiliki oleh Perumda Parkir belum terpenuhi dan masih diajukan kepada Dinas

Perhubungan Kota Denpasar. Pelaksanaan E-Parkir ini dilakukan agar mengurangi kebocoran pungutan parkir yang sering terjadi di Kota Denpasar.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Perumda Parkir dalam menentukan target yang ingin dicapai berjalan dengan baik. dimana target ditentukan dengan pertimbangan yang jelas dapat meningkatkan retribusi parkir setiap tahunnya. Bukti selanjutnya yaitu perencanaan kedua yang dilakukan oleh Perumda Parkir Kota Denpasar yakni menetapkan program yang akan dijalankan selama 1 tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dimana dalam menentukan kegiatan pun Perumda Parkir juga mengumpulkan informasi kemudian dianalisis dan melihat juga target yang ingin dicapai sehingga dapat menentukan program –program apa yang sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi. Walaupun dalam menetapkan program kebanyakan masih sama seperti tahun lalu karena kondisinya yang belum begitu berubah menurut Perumda Parkir Kota Denpasar.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan suatu proses untuk merencanakan struktur, mengelola serta mengatur tugas setiap pekerja

agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Maka berdasarkan hal tersebut pihak Perumda Parkir Kota Denpasar harus menjalankan tahap pengorganisasian dan pelaksanaannya dengan baik. Pihak Perumda Parkir Kota Denpasar bertanggungjawab dalam bidang menangani dan menjalankan pengorganisasian di Kota Denpasar untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja para petugas dan juru parkir agar berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada indikator Pengorganisasian sudah berjalan dengan efektif. Terlihat pada kinerja para pihak PD Parkir yang sudah berjalan dengan baik, dengan adanya sub-sub bagian ini maka akan masalah parkir dapat di perhatikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap bagian-bagian tahu tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan oleh PD Parkir Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan manajemen parkir guna peningkatan PAD di Perumda Parkir Kota Denpasar telah menjalankan tahap pengorganisasian dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan pengorganisasian pertama yang dilakukan pihak Perumda

Parkir Kota Denpasar yaitu membentuk bidang khusus yang menangani parkir di Kota Denpasar. Perumda Parkir Kota Denpasar dalam menjalankan pengorganisasian ini membagi kelompok kerja dan wewenang tertentu serta tanggung jawab yang akhirnya membuat suatu kesatuan usaha dalam mewujudkan tujuan. Dimana kelompok kerja dan wewenang tertentu disini yaitu bidang parkir.

Adanya bidang khusus ini masalah parkir dapat diperhatikan secara lebih lagi, karena akan serius fokus dengan masalah parkir di Kota Denpasar. Bukti selanjutnya yaitu pengorganisasian kedua yang dilakukan oleh Perumda Parkir yakni dengan adanya sub-sub bagian yang menjalankan tugasnya namun tetap satu kesatuan. Dimana setiap bagian-bagian tahu tugasnya dan berusaha menjalankan tugasnya agar tujuan dapat tercapai. Selain itu walaupun memiliki tugasnya masing – masing setiap seksi atau bagian di Bidang Parkir tetap saling membantu satu sama lain.

3. Pergerakan

Pergerakan Sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan hal yang krusial karena pergerakan merupakan serangkaian kegiatan yang harus dijalankan oleh perusahaan atau organisasi. Maka berdasarkan hal tersebut pihak Perumda Parkir Kota

Denpasar harus menjalankan tahap pergerakan dan pelaksanaannya dengan baik. Untuk kegiatan yang berjalan dengan baik dan Pergerakan yang dilakukan secara optimal tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar.

Kegiatan yang dilakukan oleh Petugas PD Parkir yang langsung terjun kelapangan ini tentunya berjalan dengan baik dan memantau dalam hal melakukan tugas para juru parkir di lapangan. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh PD Parkir baik laporanlaporan yang ada di pro denpasar danlainnya sudah ditanggapi dan berjalan dengan baik hal ini tentunya menjadi langkah baik bagi PD Parkir yang menjalankan tugasnya. Meskipun pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar tetapi masih banyak kendala yang ditemukan dilapangan.

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir pada indikator Pergerakan Dalam melaksanakan Pengelolaan parkir dalam peningkatan PAD di PD Parkir Kota Denpasar belum berjalan maksimal. Untuk kegiatan yang belum berjalan dengan baik yaitu kegiatan penerimaan retribusi parkir dari petugas parkir karena masih ada

beberapa yang mengakibatkan kebocoran disaat penerimaan retribusi parkir dari juru parkir ke Koordinator Parkir Namun untuk kegiatan pergerakan langsung mengawasi para petugas parkir dilapangan sudah berjalan dengan baik.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang di ungkap oleh masyarakat bahwa masyarakat mengatakan mengetahui aturan tersebut Lalu kedua yaitu kegiatan pemberian informasi lahan parkir yang dapat dijadikan peluang kerja oleh masyarakat yang ingin menjadi juru parkir. Dengan meningkatnya titik parkir maka retribusi parkir di Kota Denpasar dapat meningkat sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan PAD. Lalu tahap kedua penetapan yang dilakukan oleh Perumda Parkir dengan memeriksa langsung titik parkir. Serta tahap terakhir pemungutan yang mana bisa di setor langsung ke Korjur lalu kemudian korjur menyetor ke Administrasi bagian perparkiran. Lalu kegiatan kedua yaitu kegiatan pembuatan kesepakatan atau perjanjian tertulis antara juru parkir dengan perumda Parkir Kota Denpasar. Dimana kesepakatan yang dibuat

benar – benar melalui tahap pengecekan seperti jam operasional toko, besarnya lahan, ramainya kendaraan dan lainnya. Sehingga setoran yang ditetapkan didalam kesepakatan pun wajar tidak memberatkan. Lalu kegiatan ketiga yaitu kegiatan menyediakan fasilitas pendukung juru parkir dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dimana pihak Perumda Parkir Kota Denpasar memberikan rompi dan nametag untuk para juru parkir.

4. Pengawasan

Pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam usahanya untuk menjamin hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Maka berdasarkan hal tersebut pihak Perumda Parkir Kota Denpasar harus menjalankan tahap pengawasan dan pelaksanaannya dengan baik. dalam menjalankan pengawasan Perumda Parkir Kota Denpasar harus benar-benar dilaksanakan dengan baik karena pengawasan ini sangat penting karena melihat banyaknya permasalahan yang terdapat dilapangan yang dilakukan oleh Petugas parkir.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas parkir tentunya

diberikan teguran oleh pihak PD Parkir Kota Denpasar. Apabila ditemukan pelanggaran seperti parkir ilegal, tarif yang tidak sesuai, atribut yang tidak lengkap dan pelanggaran lainnya maka pihak Perumda Parkir tidak segan memberikan teguran bahkan mencabut surat izin telah ditetapkan sebelumnya dan pengawasan ini dilakukan oleh Koordinator Parkir yang selalu turun langsung kelapangan dalam hal mengawasi para petugas parkir.

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Pengawasan Dalam melaksanakan Pengelolaan parkir dalam meningkatkan PAD di PD Parkir Kota Denpasar sudah berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya para pengawas bidang parkir langsung memberikan respon terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Dibuktikan dengan dalam menjalankan pengawasan PD Parkir melakukan 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan langsung dilakukan dengan terjun lapangan. Dimana PD Parkir sebagai penanggung jawab melakukan pengecekan langsung dengan turun ke lapangan dibantu satpol pp dan polrestabes. Untuk pengawasan tidak langsung yaitu pengaduan permasalahan melalui web pro denpasar, telepon atau bisa datang langsung kek kantor untuk

menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan

Kekurangan dalam pengawasan langsung yaitu waktu pengawasan yang tidak pasti jadi tidak dicek terus menerus bisa saja saat tidak melakukan pengecekan banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Jenis pengawasan lainnya yaitu pengawasan tidak langsung dengan melihat laporan realisasi retribusi parkir setiap bulan dan laporan dari masyarakat jika menemukan pelanggaran. Namun pengawasan ini memiliki kekurangan yaitu laporan pemasukan yang dibuat kurang menjelaskan manajemen parkirnya lebih rinci sehingga tidak dapat dilakukan penilaian apakah pelaksanaan retribusi parkir telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu kekurangan lainnya yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat. Walaupun sudah ada masyarakat yang melapor namun hal itu tidak sebanding dengan masyarakat yang memilih untuk tidak melapor.

Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar

PD Parkir Kota Denpasar khususnya Bidang Parkir Kota Denpasar dalam pelaksanaan pengelolaan parkir terhadap retribusi parkir dalam peningkatan PAD Kota Denpasar

dihadapkan dengan hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi antar lain :

- a. Lemahnya kesadaran masyarakat penegakan aturan yang dilakukan oleh PD Parkir yang membantu dalam pelaksanaannya. Kelemahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan permasalahan parkir dilapangan, mereka yang sudah mengetahui permasalahan misalnya uang parkir yang tidak sesuai atribut para juru parkir yang tidak lengkap, karcis yang tidak diberikan kepada masyarakat dan parkir sembarang tempat. Banyak masyarakat yang bersikap acuh terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu kesadaran masyarakat yang rendah didapatkan dari hasil pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diterima masyarakat jika melakukan pelaporan. Misalnya kasus kerusakan atau kehilangan barang dan penarikan tarif parkir yang tidak sesuai aturan, dan lainnya. Banyak pengguna jasa lebih memilih untuk membiarkan pelanggaran yang terjadi sebab merasa kerugian yang dialami kecil hanya uang sebesar Rp 1000,-. Yang akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak melapor karena dianggap tidak terlalu merugikan
- b. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan parkir.

Pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan parkir masih banyak ditemukan dalam pelaksanaannya pengelolaan parkir, Pelanggaran yang terjadi misalnya seperti tarif yang tidak sesuai, lahan yang tidak seharusnya dipakai, juru parkir ilegal dan lainnya.

5. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD di PD Parkir Kota Denpasar nyatanya masih belum maksimal ini dibuktikan dimana dalam pelaksanaan manajemen parkir ditemukan bahwa tidak semua bagian berjalan dengan baik. Untuk bagian perencanaan telah dilakukan dengan baik dimana pihak PD Parkir merencanakan tujuan atau target yang ingin diperoleh dan merencanakan program yang akan dijalankan selama satu tahun sebagai upaya agar target dapat tercapai. Selanjutnya bagian pengorganisasian pun telah dijalankan dengan baik dimana pihak PD parkir yang telah menangani parkir dan membagi tugas ke setiap seksi.

Selanjutnya bagian pergerakan, dalam menjalankan program manajemen parkir nyatanya masih terdapat beberapa kegiatan yang kurang berjalan dengan baik. Pergerakan yang masih kurang seperti pergerakan pada kegiatan penyetoran uang parkir ke koordinator parkir karena masih ada satu dua orang yang tidak menyetor uang parkir. Sedangkan sisanya sudah berjalan dengan baik. Lalu bagian pengawasan, di tahap pengawasan ini juga belum berjalan maksimal. Terdapat 2 jenis

pengawasan yang dijalankan oleh PD Parkir yakni pengawasan tidak langsung dan langsung. Pengawasan langsung sebenarnya telah dijalankan dengan pengecekan ke lapangan dengan rutin setiap harinya. Sedangkan tidak langsung hanya mengandalkan laporan pemasukan saja yang mana tidak menjelaskan secara rinci prosesnya dan pelaporan masyarakat yang belum baik karena kurangnya kesadaran.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sarankan guna manajemen parkir yang akan dilaksanakan jauh lebih baik sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Denpasar yaitu antara lain adanya pengawasan secara berkala terhadap juru parkir, adanya akuntabilitas dalam penyelesaian masalah secara cepat dengan mengadakan sosialisasi maupun pelatihan kepada juru parkir, perlu diadakannya pembenahan parkir tidak resmi secara rutin dan intensif sehingga pengelolaan parkir di kawasan Parkir Jalan Umum lebih optimal dan aman, perlu diadakan pergerakan yaitu sosialisasi lebih gencar lagi terutama ke masyarakat mengenai aturan yang digunakan, tarif yang harus dibayarkan dan lainnya dan mungkin lewat kesempatan ini pula dapat menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk lebih peduli, terakhir ialah sistem E-Parkir yang rusak di Kota Denpasar diharapkan Pihak Perumda Parkir segera memperbaiki dan lebih memperhatikannya lagi karena E-parkir ini lebih efisien dari Parkir Karcis biasa yang ada di badan jalan Kota Denpasar karena mengurangi

kebocoran pungutan parkir dan parkir liar di Kota Denpasar.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siahaan, Marihot. P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Depok : Raja Grafindo Persada.

Sugianto. 2008. Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah). Jakarta: Grasindo.

Wulandari, Phaureula Artha, dan Emy Iryanie. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

Julastiana., dan I Wayan Suartana. 2013. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. E-Jurnal Akuntansi, 2(1):1-17.

Sukarya, I Wayan. 2012. Studi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Periode Tahun 2006-2010. Skripsi. Universitas Udayana, Denpasar.

Susila, I 2016 . Perancangan Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 349-366